

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG WISATA TELUK KILUAN KABUPATEN TANGGAMUS

Tribuana Shinta Dewi<sup>1</sup>, M. Irfan Affandi<sup>2</sup>, Ryansyah Izhar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan

<sup>2</sup>Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung

<sup>1</sup> Email : [tribuana.119220062@student.itera.ac.id](mailto:tribuana.119220062@student.itera.ac.id)

DOI : 10.35472/jppk.v4i3.1427

## ABSTRACT

*One of the tourist villages in Indonesia is Pekon Kiluan Negeri. In accordance with the Regional Regulation of Lampung Province, the concept of tourism development is that of ecotourism and community-based ecotourism. Nevertheless, it is evident that the development of Teluk Kiluan tourism has been underway since 2008, spearheaded by the local community. Teluk Kiluan Village, in particular, has the potential to become a highly competitive tourist destination, aligning itself with other priority tourist locations in Indonesia. However, in practice, the Teluk Kiluan Tourism Village still falls short of the standards set by Indonesia's priority tourist destinations. This research aims to identify the development of community participation in supporting Teluk Kiluan tourism in Pekon Kiluan Negeri, Kelumbayan District, Tanggamus Regency. This study aims to achieve two key objectives: 1. To identify the standardisation of existing conditions of community involvement in the development of Teluk Kiluan tourism, based on four key tourism components (attraction, accessibility, amenity and ancillary). 2. To identify the level of community participation in the development of Teluk Kiluan tourism in Kelumbayan District, Tanggamus Regency. The methodology employed is that of qualitative descriptive analysis. The findings revealed that there has been a two-way participation between the government and local communities in various tourism component sectors (attraction, accessibility, amenity and ancillary). This aligns with the principles of Arnstein's theory (1969) at the Citizen Power level and the 6th ladder of partnership. However, there are still obstacles hindering community participation. The recommendations can be classified into two categories: those directed towards the government and those directed towards the community.*

**Keywords:** *Tourism Village, Pekon, Kiluan Negeri, Participation*

## A. PENDAHULUAN

Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 dikelompokkan ke dalam empat pilar utama, yaitu pengelolaan berkelanjutan, manfaat sosial dan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya dan warisan, serta kelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting yang mendukung tercapainya keberlanjutan pada semua pilar tersebut. Pengembangan kesadaran partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun, menjaga, dan melestarikan objek wisata. Salah satu cara melihat daerah tersebut memiliki kesadaran terhadap pariwisata adalah dengan adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Salah satu Pokdarwis yang ada di Provinsi Lampung terdapat di Desa Teluk Kiluan di Kabupaten Tanggamus.

Pekon Kiluan Negeri berlokasi di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus memiliki 4 Dusun dan 8 Rukun Tetangga (RT) dengan 335 Rumah Tangga (KK). Berdasarkan data yang termuat pada website Pekon Kiluan Negeri tahun 2023, jumlah penduduk Pekon Kiluan Negeri berjumlah 1.619 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sejumlah 843 Jiwa dan Perempuan

776 jiwa. Jarak tempuh antara ibukota Kabupaten Tanggamus dengan Pekon Kiluan Negeri adalah sejauh  $\pm 100$  km dengan kondisi jalan yang cukup baik walau masih ada beberapa titik jalan yang memiliki kondisi jalan berlubang tidak beraspal, minim penerangan jalan, dan tanpa batas tepi jurang, selain itu moda transportasi cukup minim menuju atau di dalam Pekon Kiluan Negeri. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, kondisi jalan di dalam Pekon Kiluan Negeri atau antar dusun tidak jauh berbeda dengan jalan yang menanjak, sebagian tidak beraspal, berlumpur, berbatu, yang dapat menyulitkan masyarakat bermobilisasi.

Pekon Kiluan Negeri menyajikan banyak keindahan alam bahari Desa Teluk Kiluan dan masuk kedalam kategori 100 besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 berdasarkan Website Lidik.ID (2022). Desa Wisata Teluk Kiluan juga sudah ditetapkan sebagai Pekon/Desa wisata melalui SK Bupati Tanggamus pada tahun 2020 (Desa Wisata Teluk Kiluan, 2022). Sebelumnya pada tahun 2019 Teluk Kiluan ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan daerah untuk dikelola sebagai taman wisata perairan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 /KEPMEN-KP, (2019). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 06 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan pariwisata provinsi (RIPPPA PROV) Lampung, Pengembangan pariwisata wisata Teluk Kiluan masuk kedalam konsep ekowisata dan *community-based ecotourism* dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Dalam praktiknya pelaksanaan pengembangan konsep ekowisata di Teluk Kiluan, dicetuskan oleh Yayasan Ekowisata Cikal yang berada di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Yayasan Ekowisata Cikal pada tahun 2008 melakukan kegiatan pengelolaan ekowisata seperti pendampingan pada masyarakat, pendataan dan pengadaan sarana wisata serta menyediakan jasa pemandu wisata. Berdasarkan Purnomo (2015), Yayasan Ekowisata Cikal menjadi pencetus konsep penggerak wisata dengan nama konsep Panggawa (Penggerak Wisata) pada tahun 2008. Pokdarwis itu sendiri muncul karena inisiasi pemerintah pada tahun 2010-2011 dikarenakan adanya program PNPM Wisata, yang salah satu syaratnya Desa yang menerima program PNPM Wisata tersebut harus memiliki Pokdarwis. Maka dari saat itu, Panggawa berubah menjadi Pokdarwis Pekon Kiluan Negeri.

Adapun partisipasi masyarakat di Pekon Kiluan Negeri itu sendiri aktif dalam kegiatan pengembangan wisata yang melibatkan langsung masyarakat, dari pengelola wisata Teluk Kiluan dipegang oleh Pokdarwis msyarakat sekitar. Masyarakat juga proaktif dalam kegiatan pengembangan wisata walau berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan regenerasi kepengurusan Pokdarwis di Wisata Teluk Kiluan sulit untuk dilaksanakan dikarenakan kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan minat anak muda untuk ikut terlibat langsung kedalam pengembangan wisata Teluk Kiluan. Terlihat dari kepengurusan Pokdarwis dari tahun 2008 sampai dengan sekarang masih di pegang oleh bapak Riko Stevanus selaku pencetus Desa Wisata yang ada di Pekon Kiluan Negeri. Berdasarkan data Pekon Kiluan Negeri 2023 tingkat persentasi pendidikan masyarakat

cukup rendah, dengan rata-rata lulusan SD (Sekolah Dasar) sebesar 32% dan persentasi sarjana sebesar 1%.

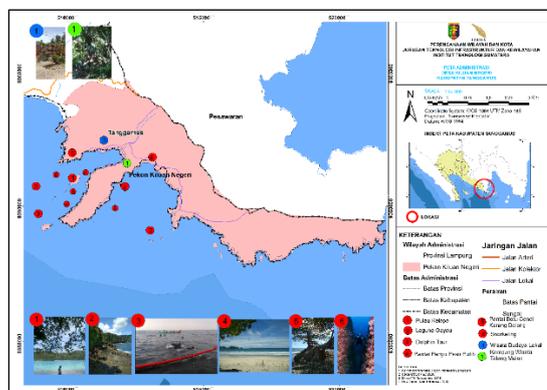
Pengembangan *Community-Based Ecotourism* menitik beratkan pada keaktifan masyarakat dalam pengembangan wisata. Pada keadannya terdapat beberapa permasalahan di dalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Teluk Kiluan, Seperti minat anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata Teluk Kiluan minim, dan ditambah lagi tingkat pendidikan atau SDM di Pekon Kiluan Negeri Minim, menyulitkan regenerasi kepengurusan Pokdarwis. berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Kawasan Konservasi Teluk Kiluan Di Provinsi Lampung (2021), kondisi pengelolaan kawasan saat ditetapkan menjadi kawasan konservasi sampai saat ini masih minim perubahan, seperti tidak adanya SOP khusus pengelolaan kawasan konservasi, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan program bidang pengawasan dinas KP yang dilakukan di dalam kawasan. Pengembangan wisata Teluk Kiluan, jika melihat dari kriteria desa wisata dengan Komponen 4 A, terdapat kekurangan seperti akses jalan yang cukup sulit di akses karena jalan yang kurang baik dan minim moda transportasi. Perkembangan wisata Teluk Kiluan dapat dibilang terlambat dibandingkan dengan wisata unggulan lainnya. ditambah lagi Pandemi Covid- 19 yang menghentikan sektor ekonomi pariwisata yang ada di wisata Teluk Kiluan (Aida, Darmawan, & Hermawan, 2021).

Maka dapat dilihat perkembangan pembangunan wisata Teluk Kiluan sudah dilakukan sejak 2008 oleh masyarakat, seharusnya Desa Teluk Kiluan sudah menjadi wisata yang berdaya saing tinggi, dan sejajar dengan wisata prioritas lainya yang ada di Indonesia, namun pada kenyataannya Desa Wisata Teluk Kiluan masih berada jauh dibanding wisata prioritas Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Wisata Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus”.

**B. METODE PENELITIAN**

**1. Lokasi Penelitian**

Lokasi studi pada penelitian ini terdapat di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.



Sumber: Hasil Olahan Menggunakan ArcGIS 10.8, 2023

**Gambar 1.** Peta Administrasi Pekon Kiluan Negeri

## 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, karena dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan variabel yang akan digunakan, berdasarkan tinjauan literatur yang sesuai dengan topik yang dibahas.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam kepada narasumber. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk mendapatkan sebuah informasi atau data yang lebih mendalam dan lengkap tentang pengembangan wisata Teluk Kiluan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara primer dan sekunder. Metode primer pada penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria responden, terdapat 9 narasumber. Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan teknik penarikan sampel yaitu *non probability sampling*. Cara Pengambilan data menggunakan teknik penarikan sampel menggunakan *non probabilitas* menggunakan sampel *purposive (purposive sampling)*. Sampel *purposive (purposive sampling)* adalah teknik pengambilan sampel yang telah menentukan kriteria narasumber sesuai kebutuhan penelitian. Tabel kriteria narasumber wawancara sebagai berikut:

**Tabel 1.** Kriteria Narasumber Berdasarkan Purposive Sampling

| No | Kategori Narasumber | Kriteria  |
|----|---------------------|---|
| 1  | Instansi Pemerintah | Pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan memahami program kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan wisata Teluk Kiluan  |
| 2  | Perangkat Desa      | Perangkat desa dari Pekon Negeri Kiluan dan memiliki keterkaitan pekerjaan atau mengetahui program yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan wisata Teluk Kiluan.  |
| 3  | Masyarakat          | Masyarakat yang ikut serta dalam Pokdarwis atau masyarakat yang aktif ikut serta dalam menjalankan tugasnya dan mengerti pengembangan dan Partisipasi Masyarakat dalam wisata Teluk Kiluan di Pekon Negeri Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. |

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 1. terdapat 3 (tiga) unit analisis dalam penelitian ini yaitu Instansi Pemerintah, Perangkat Desa, dan Masyarakat. Berikut ini tabel profil narasumber wawancara.

**Tabel 2.** Profil Narasumber Wawancara

| No | Kategori Narasumber | Nama     | Kode  | Keterangan  |
|----|---------------------|----------|-------|---|
| 1  | Pemerintah          | Ibu Yuan | PI.01 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung |
| 2  | Pemerintah          | Ibu      | PI.02 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                  |

|   |                |                     |       |  |
|---|----------------|---------------------|-------|--|
|   |                | Zulia               |       | Kabupaten Tanggamus  |
| 3 | Perangkat Desa | Bapak Maemun        | PP.01 | Kepala Desa Pekon Kiluan Negeri                                    |
| 4 | Perangkat Desa | Bapak Adi Kurnia    | PP.02 | Sekretaris Pekon Kiluan Negeri                                     |
| 5 | Perangkat Desa | Bapak Rory Getos    | PP.03 | Kasi Pemerintahan Pekon Kiluan Negeri                              |
| 6 | Perangkat Desa | Bapak Komang S      | PP.04 | Kasi Perencanaan Pekon Kiluan Negeri                               |
| 7 | Masyarakat     | Bapak Riko Stevanus | PM.01 | Ketua Pokdarwis Pekon Kiluan Negeri                                |
| 8 | Masyarakat     | Bapak Kadek         | PM.02 | Dewan Penasihat Pokdarwis  |
| 9 | Masyarakat     | Bapak Dirhamsa      | PM.03 | Sebagai Perwakilan Masyarakat yang Aktif mengikuti musyawarah desa |

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2023

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa data dari instansi terkait, kebijakan/peraturan daerah atau peraturan terkait (Instansi Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung / Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung /Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus / Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung/ Kantor Pekon Kiluan Negeri / Pokdarwis) dan hasil penelitian terdahulu sebagai acuan pengerjaan penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data untuk sasaran pertama dan kedua menggunakan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data hasil wawancara kepada narasumber yang telah diwawancarai mengenai sejauh mana masyarakat Pekon Negeri Kiluan dilibatkan, serta dukungan data lainnya seperti peraturan dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan data yang telah didapatkan lalu diolah sehingga mendapat sebuah hasil atau kesimpulan. Adapun cara memudahkan melakukan analisis deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Editing

Kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari wawancara atau dokumen literature. Manfaat dari proses editing ini adalah dapat meminimalisir kekeliruan dalam menganalisis data.

##### b. Pengkodean Data (Coding)

Pengkodean disusun berdasarkan informan dan klasifikasi setiap pertanyaan.

A2. PI.01-05 // B. PP.02-07// C1. PM.03-67

Keterangan :

A/B : Jenis kategori informasi sasaran (termasuk kedalam sasaran pertama Sub bab 1 simbol A1 / sasaran kedua simbol B / sasaran ketiga sub bab 2 C2 )

PI /PP./PM : Jenis kategori informan (kode PI untuk informan Instansi pemerintah, PP untuk informan Perangkat Desa dan PM untuk informan Masyarakat)

.01/02/.../12 : nomor urut informasi (contoh B. PM.02 maka artinya informan dari sasaran kedua, ku, Narasumber masyarakat 02)

-05/-08/-34 : Nomor urut informasi (contoh C1. PP.02-08 maka artinya informan dari sasaran ketiga sub bab 1, Pengurus Desa, Narasumber pengurusdesa kedua, pertanyaan nomor 8.

#### c. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan reduksi data yang telah didapat guna memisahkan data yang dapat digunakan atau tidak dalam penelitian ini.

#### d. Kategori Jenis Data

Kategori Jenis data digunakan untuk memberikan kode terhadap informan yang ada dalam penelitian ini.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Mengidentifikasi Standarisasi Kondisi eksisting keterlibatan Masyarakat Wisata Teluk Kiluan berdasarkan 4 Konsep Pariwisata (*attraction, accessibility, amenity dan ancillary*)

##### a. *Attraction* (Objek daya Tarik Wisata)

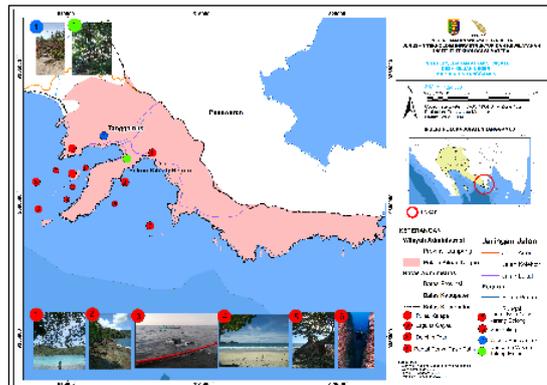
Terdapat tiga atraksi atau objek daya tarik wisata yaitu atraksi wisata alam, atraksi wisata budaya dan atraksi wisata buatan manusia. Dari hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat 6 atraksi wisata alam, 2 atraksi wisata budaya dan 4 atraksi wisata buatan. Dari 6 daya Tarik wisata alam yang disajikan oleh Teluk Kiluan itu sendiri terdapat 4 wisata unggulan dan 2 wisata yang sedang dikembangkan, yaitu pulau kelapa, laguna gayau, *dolphin tour* dan pantai penyu pasir putih (Unggulan) dan Kampung Wisata Talang Mulan dan antai Batu Candi Karang Bolong (Sedang Dikembangkan).

Wisata alam di Pekon Kiluan Negeri merupakan hasil rintisan atau swadaya masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari inisiatif warga yang secara bersama-sama menciptakan destinasi wisata baru dan menghidupkan kembali objek wisata yang sempat mengalami penurunan. Upaya ini sejalan dengan arahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Lampung. Dalam pengembangannya, pariwisata Provinsi Lampung mengacu pada beberapa konsep, termasuk ekowisata dan Community-Based Ecotourism.

Adapun hal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan atraksi wisata di Teluk Kiluan, sebagai berikut.

1. Meningkatkan jumlah pengunjung Wisata Pantai Penyu Pasir Putih yang sempat berhenti akibat isu tsunami dan pandemi dengan memperbaiki pengelolaan yang sudah mulai tertata dibanding sebelumnya.
2. Terdapat penggerak pelestari terumbu karang yang disebut Gerakan Anak Nemo yang kegiatannya melestarikan dan menanam terumbu karang.
3. Terdapat POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan) yang menjadi pengawas bagi masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan *illegal fishing*, merusak habitat penyu atau merusak habitat laut.

4. Dengan membuka wisata baru yaitu Kampung Wisata Talang Mulan dan Pantai Batu Candi Karang Bolong untuk mendongkrak minat wisatawan berkunjung ke Teluk Kiluan.
5. Mengikuti ajang ADWI (Anugrah Desa Wisata Indonesia) 2023, dengan membuat profil desa dan mengenal kan Pekon Kiluan Negeri ke kancah nasional. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Adi Kurnia selaku Sekretaris Desa dan Bapak Riko Stevanus selaku Ketua Pokdarwis Pekon Kiluan Negeri.



Sumber: Hasil Olahan Menggunakan ArcGIS 10.8, 2023  
**Gambar 2.** Peta Persebaran Attraction (Objek daya Tarik Wisata)

b. *Accessibility* (Aksesibilitas)

*Accessibility* (aksesibilitas) berperan penting dalam memudahkan pengunjung atau turis mengakses suatu destinasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa aspek, seperti kondisi jalan, akses alternatif, moda transportasi, dan rambu-rambu petunjuk jalan. Hal ini sejalan dengan Panduan Desa Wisata Tahun 2021 yang menekankan pentingnya aksesibilitas yang baik dan memadai untuk memfasilitasi wisatawan. Pekon Kiluan Negeri yang terletak di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus memiliki jarak sekitar 80 km dari Kota Bandar Lampung dan sekitar 137 km dari Kota Agung. Namun, kondisi fisik jalan yang berkelok dan menantang membuat wisata Teluk Kiluan cukup sulit dijangkau.

Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas di Teluk Kiluan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat berswadaya bersama melakukan gotong royong bersama pokdarwis dan yang lainnya membuka jalan kecil (jalan yang berada di lingkaran wisata atau jalan antar desa). Pembuatan jalan dengan lebar 2 meter, biasanya jalan yang dibuka dapat digunakan untuk kendaraan bermotor atau pejalan kaki.
2. Mengajukan kepada instansi terkait mengenai jalan utama yang rusak.
3. Membuat rambu atau petunjuk arah dari kayu untuk memudahkan wisatawan.



Sumber: Hasil Olahan Menggunakan ArcGIS 10.8, 2023  
**Gambar 3.** Peta Persebaran *Accessibility* (Aksesibilitas)

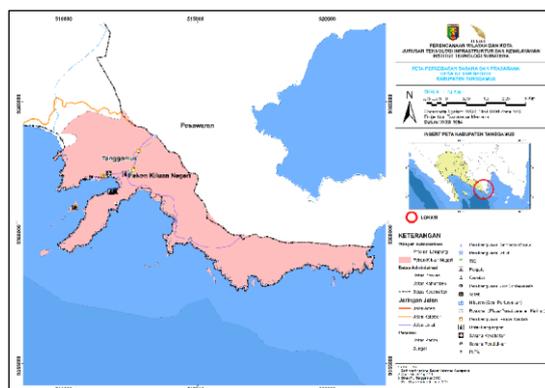
c. *Amenity* (Amenitas)

*Amenitas* dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pariwisata. Berdasarkan teori Cooper dkk. (1995) dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, terdapat 31 jenis sarana dan prasarana yang ideal untuk mendukung pariwisata. Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 31 jenis sarana dan prasarana tersebut, Pekon Kiluan Negeri hanya memiliki 25 di antaranya. Adapun 6 sarana dan prasarana yang belum tersedia di Pekon Kiluan Negeri adalah Pembangunan Titik Labuh/Singhah Kapal Yacht, Pembangunan Dive Center dan peralatannya, Pembangunan Surfing Center dan peralatannya, Pembangunan Menara Pandang (Viewing Deck), Jaringan Persampahan, dan Sistem Air Limbah.

Untuk meningkatkan amenitas di Teluk Kiluan, masyarakat telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

1. Masyarakat menyediakan penginapan untuk masyarakat.
2. Masyarakat menyediakan peralatan menyelam dan alat camping (Ada barang didapatkan dari bantuan pemerintah).

Adapun peta sebaran amenitas di wisata Teluk Kiluan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Olahan Menggunakan ArcGIS 10.8, 2023  
**Gambar 4.** Peta Persebaran *Amenity* (Amenitas)

d. *Ancillary* (Tambahan)

*Ancillary* (Tambahan) adalah hal yang mendorong pengembangan seperti organisasi, pemerintah, dan pengelola wisata. Organisasi yang ikut serta dalam pembangunan wisata Teluk Kiluan dan Kebijakan dan Program kerja Masyarakat yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan dalam mendukung pembangunan wisata Teluk Kiluan. Berdasarkan (Priono, 2012) terdapat 5 (lima) Prinsip Ekowisata yaitu:

1) Prinsip Konservasi,

Penyusunan Dokumen Rencana Penetapan Zona Kawasan Konservasi Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus tahun 2012, Pemberian bantuan dari pemerintah sebuah alat selam Dari tahun 2005 sampai dengan sekarang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Pelatihan bagi Masyarakat yang terdapat di Pekon Kiluan Negeri, Pembuatan Talud mencegah longsor dan Pembuatan rumah untuk korban tsunami. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Kadek selaku Dewan Penasihat Pokdarwis dan Pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Kadek selaku Dewan Penasihat Pokdarwis.

2) Prinsip Partisipasi Masyarakat,

Melakukan MUSDUS (Musyawarah Desa), melakukan MUSDES (Musyawarah Desa), melakukan Musrembang Kecamatan, Komunikasi lokal mengenai pengembangan potensi wisata Teluk Kiluan, dan Evaluasi Pengembangan Wisata Teluk Kiluan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022.

3) Prinsip Ekonomi,

Terdapat bantuan dari pemerintah berupa pelatihan pengolahan hasil laut menjadi barang ekonomis kepada masyarakat dan penguatan program pokdarwis

4) Prinsip Edukasi,

Meningkatkan kualitas dan pengetahuan masyarakat yang tergabung dalam komunitas lokal kami mengadakan program pelatihan dan pendidikan serta bimbingan teknis bekerja sama dengan Pemerintah dan Akademisi. Memberikan Pendidikan bagi murid sekolah SD dan SMP di Desa Kiluan Negeri bekerja sama dengan Akademisi dan sukarelawan. Pendidikan dan Pelatihan penanganan mamalia laut terdampar bagi masyarakat desa kiluan Negeri. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan hutan mangrove dan pemanfaatannya Tahun 2015, dan Pendidikan dan Pelatihan dasar bagi Kelompok selam desa.

5) Prinsip Wisata.

Terdapat pendampingan kepada pokdarwis dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Standarisasi Desa Wisata Teluk Kiluan dengan konsep 4A mencakup kriteria *Attraction*, *Accessibility*, *Amenity*, dan *Ancillary*. Dalam penelitian ini, kriteria-kriteria tersebut terbagi ke dalam variabel-variabel yang masing-masing memiliki standar tersendiri. Standardisasi dari kriteria desa wisata berdasarkan Panduan Desa Wisata 2021 dan (Priono, 2012) dengan konsep 4A sebagai berikut :

**Tabel 3.** Standarisasi Desa Wisata Teluk Kiluan dengan Konsep 4A

| No | Kriteria Desa Wisata dengan Konsep 4 A | Standar Minimal             | Variabel              | Keterangan (Sesuai/Kurang/Tidak Sesuai) | Analisis   |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 1  | <i>Attraction</i>                      | (Panduan Desa Wisata, 2021) | Atraksi Wisata Alam   | Kurang Sesuai Standar                   | Atraksi Wisata alam memiliki kesesuaian standar pada point 1 sampai dengan 3. Untuk point 4-7 tidak memiliki kesesuaian dikarenakan setelah isu tsunami tahun 2018 dan covid -19 terjadi penurunan pengunjung, namun 2023 sudah mulai bergeliat kembali. |
|    |  |                             | Atraksi Wisata Budaya | Tidak Sesuai Standar                    | Atraksi wisata budaya yang terdapat di Pekon Kiluan Negeri pernah terjadi namun itu sudah lama tahun 2007, belum ada inovasi baru dan perkembangan yang signifikan.  |
|    |  |                             | Atraksi Wisata Buatan | Kurang Sesuai Standar                   | Atraksi Wisata Buatan yang terdapat di Pekon Kiluan Negeri terdapat kesesuaian pada point 1-3 walau begitu belum terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengunjung wisata.   |
| 2  | <i>Accessibility</i>                   | (Panduan Desa Wisata, 2021) | Atraksi Wisata Alam   | Kurang Sesuai Standar                   | Atraksi Wisata alam memiliki kesesuaian standar pada point 1 sampai dengan 3. Untuk point 4-7 tidak memiliki kesesuaian dikarenakan setelah isu tsunami tahun 2018 dan covid -19 terjadi penurunan pengunjung, namun 2023 sudah mulai bergeliat kembali. |
|    |  |                             | Atraksi Wisata Budaya | Tidak Sesuai Standar                    | Atraksi wisata budaya yang terdapat di Pekon Kiluan Negeri pernah terjadi namun itu sudah lama tahun 2007, belum ada inovasi baru dan perkembangan yang signifikan.  |
|    |  |                             | Atraksi Wisata Buatan | Kurang Sesuai Standar                   | Atraksi Wisata Buatan yang terdapat di Pekon Kiluan Negeri terdapat kesesuaian pada point 1-3 walau begitu belum terjadi peningkatan yang  |

| No | Kriteria Desa Wisata dengan Konsep 4 A | Standar Minimal                                | Variabel  | Keterangan (Sesuai/Kurang/Tidak Sesuai) | Analisis  |
|----|--|--|---|---|---|
|    |  | (Panduan Desa Wisata, 2021)                    | Atraksi Wisata Alam                                     | Kurang Sesuai Standar                   | signifikan dalam jumlah pengunjung wisata. Atraksi Wisata alam memiliki kesesuaian standar pada point 1 sampai dengan 3. Untuk point 4-7 tidak memiliki kesesuaian dikarenakan setelah isu tsunami tahun 2018 dan covid -19 terjadi penurunan pengunjung, namun 2023 sudah mulai bergeliat kembali.             |
| 3  | <i>Amenity</i>                         | (Panduan Desa Wisata, 2021)                    | Sarana dan Prasarana Pariwisata                         | Kurang Sesuai Standar                   | Sarana dan Prasarana di Wisata Pekon Kiluan Negeri sudah banyak yang terpenuhi walau kualitasnya berbeda beda ada yang baik namun ada juga yang buruk.  |
| 4  | <i>Ancillary</i>                       | (Panduan Desa Wisata, 2021) Dan (Priono, 2012) | Organisasi / Lembaga Pendukung Pengembangan Desa Wisata | Sesuai Standar                          | Sudah terorganisir, sudah terdapat pengelolaan desa wisata yaitu pokdarwis, bumdes, dan koperasi wisata desa. Sudah terdapat kebijakan prinsip konservasi, partisipasi masyarakat, prinsip ekonomi, prinsip wisata, dan prinsip edukasi.  |
|    |  | (Panduan Desa Wisata, 2021)                    | Informasi dan Promosi                                   | Sesuai Standar                          | Informasi dan Promosi yang telah dilakukan menggunakan media cetak maupun media sosial. adapula website yang digunakan sebagai sarana promosi dan informasi, dari pihak pemerintah maupun masyarakat (pokdarwis). kemudahan layanan informasi dan promosi yang sering digunakan adalah Whats App dan Instagram. |

Sumber : Analisis Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan membandingkan keadaan eksisting dengan standar minimal berdasarkan Panduan Desa Wisata 2021, Pekon Kiluan Negeri memiliki beragam atraksi wisata, termasuk wisata alam, budaya, dan buatan. Namun, menurut pedoman desa wisata 2021, wisata alam dan buatan masih kurang memenuhi standar, sedangkan wisata budaya tidak sesuai standar. Aksesibilitas ke Pekon Kiluan Negeri telah membaik dibandingkan lima tahun sebelumnya, tetapi kondisi jalan

tetap buruk dan tidak ada alternatif jalan yang memadai. Rambu penunjuk arah dan kondisi jalan dinilai kurang sesuai standar, sementara moda transportasi sudah memenuhi standar. Berikutnya Amenitas wisata sudah ada, tetapi banyak yang kurang terawat dan beberapa fasilitas belum tersedia. Menurut pedoman desa wisata 2021, sarana dan prasarana masih kurang sesuai standar. Terakhir *Ancillary* sudah terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan wisata. Program dan kebijakan pemerintah, baik daerah maupun instansi terkait, telah membantu perkembangan wisata Kiluan, dan aspek promosi serta organisasi pendukung sudah sesuai standar. Secara keseluruhan, Pekon Kiluan Negeri memiliki potensi wisata yang besar, tetapi masih perlu perbaikan dalam hal standar *Attraction*, *Accessibility*, dan *Amenity*.

## 2. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Teluk Kiluan berada pada tingkat ke-6 dalam tangga partisipasi menurut Arnstein (1969), yaitu kemitraan. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, yaitu perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, serta pengurus desa dan masyarakat setempat. Penjabaran hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.** Perbandingan Kondisi Partisipasi Masyarakat di Pekon Kiluan Negeri dengan Teori Arnstein (1969)

| No | Variabel   | Indikator  | Keadaan Partisipasi di Pekon Kiluan Negeri   | Kesesuaian  |
|----|------------|--|--|---|
| 1  | Manipulasi | Tidak ada dialog atau musyawarah, semuanya sudah ditentukan pemerintah   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah adanya dialog atau musyawarah, bukan hanya seremoni belakang.</li> <li>• Musyawarah yang dilakukan selalu dilakukan teratur dari tingkatan RT, Dusun, hingga Desa yang melibatkan Masyarakat</li> </ul>                                   | TIDAK SESUAI (tidak adanya kesesuaian antara tangga manipulasi pada teori Arnstein (1969) dengan keadaan di Pekon Kiluan Negeri)  |
| 2  | Terapi     | Semua sudah ditentukan dari pemerintah dan hanya beberapa saja rancangan kegiatan yang disampaikan serta tidak ada dialog untuk menanggapi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat diskusi mengenai pengembangan Desa Wisata secara dua arah dengan pemerintah dan masyarakat</li> <li>• Semua Rancangan Kegiatan sudah disampaikan dari pemerintah ke masyarakat melalui musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa</li> </ul> | TIDAK SESUAI (tidak adanya kesesuaian antara tangga Terapi pada teori Arnstein (1969) dengan keadaan di Pekon Kiluan Negeri)  |
| 3  | Informasi  | Semua sudah ditentukan dari pemerintah dan semua rancangan kegiatan juga disampaikan tetapi tetap tidak                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat diskusi mengenai pengembangan Desa Wisata secara dua arah dengan pemerintah dan masyarakat</li> <li>• Semua Rancangan Kegiatan mengenai pengembangan Desa Wisata sudah disampaikan dari pemerintah ke masyarakat</li> </ul>            | ADANYA KESESUAIAN (kesesuaian terdapat pada bagian informasi sudah disampaikan kepada masyarakat namun terdapat ketidaksesuaian pada keterlibatan jika di Pekon Kiluan Negeri sudah ada |

| No | Variabel      | Indikator   | Keadaan Partisipasi di Pekon Kiluan Negeri  | Kesesuaian   |
|----|---------------|---|---|--|
|    |               | ada dialog untuk menganggap   | melalui musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa  | diskusi dua arah, namun pada tingkatan ini hanya satu arah)  |
| 4  | Konsultasi    | Masyarakat dipersilakan memberikan usulan, walaupun tidak dijamin untuk diterima  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat diskusi mengenai pengembangan Desa Wisata secara dua arah dengan pemerintah dan masyarakat</li> <li>• Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulannya</li> <li>• Usulan tersebut akan ditampung dan akan diskusikan bersama pada forum tersebut untuk dicari titik tengahnya</li> </ul>  | ADANYA KESESUAIAN (kesesuaian terdapat pada pemberian usulan pada saat musyawarah namun terdapat ketidaksesuaian pada usulan yang kemungkinan tidak dijamin untuk diterima, karena pada kenyataannya terdapat diskusi kembali untuk mencari titik tengah)      |
| 5  | Penentraman   | Semua usulan diterima, namun usulan tersebut tetap dinilai kelayakannya oleh pemerintah untuk dilaksanakan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulannya</li> <li>• Usulan tersebut akan ditampung dan akan diskusikan bersama pada forum tersebut untuk dicari titik tengahnya</li> <li>• Untuk usulan masyarakat yang ternyata tidak dapat ditampung oleh dana desa maka akan dialihkan untuk rencana di tahun berikutnya dengan mengadakan Musrembang kecamatan.</li> </ul> | ADANYA KESESUAIAN (kesesuaian terdapat pada usulan yang sudah diterima namun terdapat perbedaan yang dimana pengambilan keputusan di Pekon Kiluan Negeri dilakukan bersama dengan masyarakat namun pada tingkatan ini keputusan masih dinilai oleh pemerintah) |
| 6  | Kemitraan     | Masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama merancang dan melaksanakan kegiatan dalam pembangunan desa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Pokdarwis yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pariwisata</li> <li>• Pemerintah dan masyarakat dalam musyawarah memiliki kesetaraan dalam mengusulkan atau memberi saran terhadap pembangunan desa.</li> </ul>   | ADANYA KESESUAIAN (adanya kesesuaian terhadap tingkatan kemitraan dengan keadaan di Pekon Kiluan Negeri)   |
| 7  | Pendelegasian | Pemerintah memberikan kewenangan dalam merancang, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan desa, masyarakat diberi tanggung jawab penuh untuk beberapa program. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokdarwis sebagai wadah masyarakat untuk memberikan usulan kepada pemerintah dalam musyawarah</li> <li>• Pokdarwis dan masyarakat berperan ikut serta dalam merancang, melaksanakan dan evaluasi bersama pemerintah</li> <li>• Monitoring kegiatan mengenai pengembangan Desa Wisata masih dilakukan oleh pemerintah</li> </ul>  | TIDAK SESUAI (tidak adanya kesesuaian antara tangga pendelegasian pada teori Arnstein (1969) dengan keadaan di Pekon Kiluan Negeri)  |
| 8  | Kekuasaan     | Masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang seimbang di dalam merancang program</li> </ul>   | TIDAK SESUAI (tidak adanya kesesuaian antara tangga pendelegasian pada teori Arnstein (1969))  |

| No | Variabel | Indikator  | Keadaan Partisipasi di Pekon Kiluan Negeri   | Kesesuaian                             |
|----|----------|--|--|--|
|    |          | kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama. Peran masyarakat lebih besar dibandingkan peran pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat belum bisa membuat program mengenai pengembangan Desa Wisata secara penuh tanpa bantuan pemerintah</li> <li>• Pokdarwis dan masyarakat berperan ikut serta dalam merancang, melaksanakan dan evaluasi bersama pemerintah</li> <li>• Monitoring kegiatan mengenai pengembangan Desa Wisata masih dilakukan oleh pemerintah</li> </ul> | dengan keadaan di Pekon Kiluan Negeri) |

Sumber : Analisis Peneliti, 2023 berdasarkan Teori Arnstein (1969)

Melihat dari keadaan eksisting, hasil wawancara hingga ke tabel kesesuaian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Pekon Kiluan Negeri masuk ke dalam tingkatan *Citizen Power* dan tangga ke 6 kemitraan (*partnership*) menurut Teori Arnstein (1969), walau begitu Pekon Kiluan Negeri belum sepenuhnya masuk kedalam tingkatan *citizen power* dikarenakan masih masuk kedalam tangga ke 6 yaitu “kemitraan” (*partnership*) dan belum mencapai tangga ke delapan yaitu “kekuasaan”. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan *key person* dan membandingkan dengan indikator seperti tertera pada tabel diatas. Berikut adalah tangga Teori Arnstein (1969):

**Tabel 5.** Tangga Teori Arnstein (1969)

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| 8 | Kekuasaan ( <i>Citizen Control</i> )     |                                 |
| 7 | Pendelegasian ( <i>Delegated Power</i> ) | <i>Degrees of Citizen Power</i> |
| 6 | Kemitraan ( <i>Partnership</i> )         |                                 |
| 5 | Penentraman ( <i>Placation</i> )         |                                 |
| 4 | Konsultasi ( <i>Consultation</i> )       | <i>Degrees of Tokenism</i>      |
| 3 | Informasi ( <i>Informing</i> )           |                                 |
| 2 | Terapi ( <i>Therapy</i> )                |                                 |
| 1 | Manipulasi ( <i>Manipulation</i> )       | <i>Nonparticipation</i>         |

Sumber : Arnstein (1969)

Adapun kendala- kendala didalam melakukan Partisipasi Masyarakat pengembangan wisata Teluk Kiluan, sebagai berikut: Akses Jalan, Faktor Alam, Pengelolaan Persampahan, Jaringan Telekomunikasi, Retribusi Desa (Pendanaan), Kekurangan SDM yang berkualitas dan Tingkat Kesadaran Masyarakat mengenai menjaga habitat Laut. Jika kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir, maka bukan tidak mungkin pengembangan partisipasi masyarakat di Pekon Kiluan Negeri menjadi lebih baik dikarenakan dengan akses jalan, persampahan telekomunikasi yang baik bisa meningkatkan jumlah pengunjung yang datang dan dapat mengatifikan kembali pembiayaan (Retribusi Desa) yang terhambat. Wisata Teluk Kiluan juga memiliki keterbatasan dalam pencatatan data statistik jumlah pengunjung wisata (Purnomo, 2015). Dengan adanya SDM yang berkualitas, tingkat kesadaran masyarakat yang lebih peduli lingkungan dapat membuat Pekon Kiluan Negeri

dapat melaksanakan program kegiatan pembangunan wisata tanpa bantuan Pemerintah, menjadi sebuah Desa Wisata yang Mandiri.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa sudah terdapat partisipasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat lokal di berbagai sektor konsep pariwisata (*attraction, accessibility, amenity dan ancillary*). Menurut teori Arnstein (1969) pada tingkatan Citizen Power dan tangga ke 6 kemitraan (*partnership*), dengan gambaran partisipasi masyarakat di Pekon Kiluan Negeri terdapat Pokdarwis yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pariwisata, lalu Pemerintah dan masyarakat dalam musyawarah memiliki kesetaraan dalam mengusulkan atau memberi saran terhadap pembangunan desa. Namun terdapat kendala – kendala internal maupun eksternal yang perlu ditingkatkan dalam partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan Wisata Teluk Kiluan, seperti Akses Jalan, Faktor Alam, Pengelolaan Persampahan, Jaringan Telekomunikasi, Retribusi Desa (Pendanaan), Kekurangan SDM yang berkualitas dan Tingkat Kesadaran Masyarakat mengenai menjaga habitat Laut. Adapun rekomendasi bagi pemerintah adalah perlunya mengadakan kegiatan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat terkait *digital marketing* yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. Pelatihan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan wisata Teluk Kiluan, khususnya dalam memperluas jangkauan promosi dan menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk menetapkan atau menyusun *masterplan* wisata Teluk Kiluan. *Masterplan* ini dapat berfungsi sebagai pedoman pembangunan kawasan wisata agar tetap berbasis ekowisata sekaligus mempermudah proses menarik investor. Penyusunan ini sebaiknya dilakukan secara terintegrasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi agar pembangunan di kawasan Kiluan lebih terarah dan berkelanjutan. Rekomendasi bagi masyarakat untuk pengembangan Wisata Teluk Kiluan mencakup tiga hal utama. Pertama, menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti panggung pertunjukan serta tempat berjualan cinderamata dan kuliner. Kedua, meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan di Pekon Kiluan Negeri. Ketiga, bersama dengan Pokdarwis, masyarakat diharapkan merangkul generasi muda agar lebih aktif dalam kegiatan pariwisata, sehingga menumbuhkan rasa peduli terhadap daerah serta mendukung perkembangan Wisata Teluk Kiluan, Pekon Kiluan Negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Aida, N., Darmawan, A., & Hermawan, E. (2021). Reformulasi Pengetahuan Masyarakat Desa Kiluan Negeri Kabupaten Tanggamus Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) . *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* , hlm.24—26.
- [2] Arida, I. N. S. (2016). *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*. 1–86.
- [3] Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- [4] Cooper, John Fketcher, David Gilbert and Stephen Wanhill. (1995). *Tourism*

- Principles and Practice*. London: Logman.
- [5] *Desa Wisata Teluk Kiluan*. (2022). Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. [https://jadesta.kemendparekraf.go.id/desa/teluk\\_kiluan](https://jadesta.kemendparekraf.go.id/desa/teluk_kiluan)
- [6] Lidik.ID. (2022, April 24). *Pengumuman KURASI 100 Besar Desa Wisata ADWI 2022, Ini Daftar Nama Desa Yang Lolos*. Retrieved from Lidik.ID: <https://lidik.id/pengumuman-kurasi-100-besar-desa-wisata-adwi-2022-ini-daftar-nama-desa-yang-lolos/>
- [7] Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 tahun 2015. (n.d.).
- [8] Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata,
- [9] Priono, Y. (2012). Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat. *Jurnal Perspektif Arsitektur*, 7(1), 51–67.
- [10] *Profil Pekon Kiluan Negeri*. (2015). <https://kiluannegeri.com/profil>
- [11] Purnomo, A. M. (2015). Pemberdayaan Sosial Dalam Pengembangan Ekowisata Di Pekon Kiluan Negeri, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Journal of Social Welfare*, 110-121.